

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

SKRIPSI

**PERAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DI
KECAMATAN BOLIYOHUTO (DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 JO PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998)**

Di ajukan Oleh :

SUSANTI S. IGIRISA

NIM. 271412198

Telah Di Perkisa dan Di setuju untuk Diuji

Pembimbing I

Pembimbing II


Mutia Cherawaty Thalib SH.,MH
NIP: 196907041998022001


Novendri M. Nggilu, SH.,MH
NIP: 19891127201404001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Novendri M. Nggilu, SH.,MH
NIP : 19891127201404001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM DI KECAMATAN
BOLIOHUTO (DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
2016 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998)

Diajukan Oleh :

SUSANTI S. IGIRISA

NIM. 271412198

Telah Diuji dan Dipertahankan di depan dewan penguji

1. Weny Almoravid Dunga SH.,MH
NIP: 196805222001121001

1. 

2. Lisnawaty W. Badu SH.,MH
NIP: 19690592005012001

2. 

3. Mutia Cherawaty Thalib SH.,MH
NIP: 196907041998022001

3. 

4. Novendri M. Nggilu, SH.,MH
NIP: 19891127201404001

4. 

Gorontalo, 22 Agustus 2019

Mengetahui,

PLT. DEKAN FAKULTAS HUKUM

Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Dian Ekawaty Ismail SH.,MH

FAKULTAS HUKUM NIP: 197412232003122001

ABSTRAK

Susanti S. Igrisa Nim 271412198. Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan di Kecamatan Boliyohuto (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998). Mutia Cherawaty Thalib SH.,MH selaku pembimbing I dan Novendri M. Nggilu SH.,MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan di Kecamatan Boliyohuto (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998)

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada dasarnya tidak terlepas dari keinginan dan harapan pemerintah untuk menciptakan serta mewujudkan tertib hukum di masyarakat dalam bidang pertanahan. Camat yang ditunjuk berdasarkan surat Menteri Agraria selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam urusan pertanahan khususnya dalam memenuhi legalitas hukum tanah bagi masyarakat yang wilayahnya termasuk dalam zona yang masih jauh dan sulit dijangkau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kendala-kendala yang dihadapi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pertama, desakan kebutuhan atas tanah. Kedua, Terjadinya perbedaan kehendak diantara ahli waris terhadap tanah yang menjadi objek untuk dialihkan. Ketiga, permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli ditandatangani. Adanya pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang diperjual belikan tetapi namanya tidak tercantum di dalam sertipikat

Kata Kunci : *Peran, Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*

ABSTRACT

Susanti S. Igirisa. Student ID Number 271412198. The Role of *Camat* (Head of Sub-district) as Temporary Land Deed Maker Official in Terms of Realizing Orderly Land Law in Boliyohuto Sub-district (Reviewed from Government Regulation No. 24 of 2016 in conjunction with Government Regulation No. 37 of 1998). The principal supervisor is Mutia Cherawaty Thalib, SH., MH., and the co-supervisor is Novendri M. Nggilu, SH., MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo.

The research objective was to find out and analyze the Role of *Camat* (Head of Sub-district) as Temporary Land Deed Maker Official in Terms of Realizing Orderly Land Law in Boliyohuto Sub-district (Reviewed from Government Regulation No. 24 of 2016 in conjunction with Government Regulation No. 37 of 1998).

The data in this research were analyzed descriptively by applying a qualitative approach.

Based on the finding, the appointment of Temporary Land Deed Maker Official was based on the desire and expectation of government to create and realize legal administration in the community in the field of land. *Camat*, who was appointed based on the decree of Minister of Agrarian Affairs as Head of National Land Agency acted as service connector of Government for land affairs particularly in meeting legality of land law for the community in the region including distant zone that was difficult to reach by the Land Deed Maker Official. Obstacles encountered by *Camat* as Temporary Land Deed Maker Official were, first, the insistence of the need for land. Second, there was a distinction of will among heirs on land that became object to be shifted. Third, the problem occurred prior to the signing of deed of sale and purchase. The presence of another party that felt entitled to land which was for sale, yet the name was not listed on the certificate.

Keywords: Role, *Camat*, Temporary Land Deed Maker Official

